# BAB I

# PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Adanya isu global yang ditandai dengan meningkatnya hubungan antar negara, hal ini dikarena adanya kesadaran bahwa kegagalan dalam mengatasi isu global tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional secara keseluruhan, segala peningkatan keterkaitan akibat globalisasi telah membuat mudahnya komunikasi dan menyadari hal-hal baru yang terjadi tidak hanya di negara sendiri, tetapi juga di tempat lain di seluruh dunia.[[1]](#footnote-1) Globalisasi sebagai satu kekuatan yang kompleks dan totaliter memiliki keterkaitan erat dengan neoliberalisme, di mana di dalamnya terdapat ekspresi dalam deregulasi, saling ketergantungan keuangan, moneter, peningkatan perdagangan, investasi, perjalanan, hingga migrasi.[[2]](#footnote-2)

Keadaan Global yang makin lama makin maju dan keberhasilan pembangunan dalam negeri menyebabkan interaksi Indonesia dengan negara-negara lain di global makin menigkat. Hal ini ditandai dengan terbentuknya kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Dalam menyelenggarakan kerja sama politik, Indonesia mempunyai tujuan-tujuan yang terkandung di Pembukaan UUD 1945. Interaksi antarnegara tersebutlah yang yang membuat suatu negara memutuskan untuk saling berhubungan melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, hasil dari hubungan antarnegara tersebut memunculkan prinsip kerjasama antarnegara yang di mana dalam prinsip ini memiliki aturan yaitu [[3]](#footnote-3);

1. saling menghormati kedaulatan negar lain,
2. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan
3. saling menguntungkan.

Otonomi daerah oleh pemerintah pusat, hal ini makin mendesak pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antardaerah dengan daerah dalam negeri dan luar negeri yang di mana berkat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat mengundang aktor baru yaitu pemerintah daerah atau kota dalam interaksi hubungan internasional. Otonomi daerah semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government,* bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung. [[4]](#footnote-4)

Dalam halnya diplomasi sebagai bentuk umum dalam hubungan internasional juga tidak kebal terhadap perubahan global yang sedang berlangsung disemua bidang kehidupan sosial tersebut. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perilaku diplomatik yang lebih intensif dan efektif. Di mana globalisasi telah mengubah cara di mana negara dan aktor internasional berkomunikasi, bernegosiasi dan berinteraksi. Sejak abad ke-19, perbedaan semakin dirasakan akibat transformasi dari diplomasi klasik (suatu bentuk proses komunikasi antara negara satu dengan negara lain) ke diplomasi modern (terbuka pada publik).[[5]](#footnote-5)

Diplomasi secara modern tidak lagi merujuk pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan diplomat resminya saja namun diplomasi juga dapat digunakan untuk menyebut internaksi internasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional bukan negara (Paradiplomasi). Karena aktor pemerannya tidak lagi hanya negara, maka tujuan dari diplomasi sendiri juga berkembang menyesuaikan kepentingan. Sementara para kelompok kepentingan memanfaatkannya untuk memperjuangkan kepentingan mereka, seperti lingkungan, kesehatan, sanitasi ataupun pendidikan. Begitu juga organisasi internasional maupun regional yang memanfaatkan diplomasi sebagai sarana memperbaiki tatanan hubungan dan norma internasional.[[6]](#footnote-6) Diplomasi modern ditandai dengan peningkatan luar bisaa dalam entitas internasional yang terlibat dalam kontak internasional, baik dari negara berpengaruh hingga tidak berpengaruh. Namun, konsep diplomasi global tidak berarti hanya sebatas hubungan politik ataupun kontak antar negara dan organisasi internasional. Diplomasi modern melibatkan sejumlah hubungan lain seperti ekonomi, budaya, pendidikan, militer, ilmiah, dan lain sebagainya.[[7]](#footnote-7)

Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia yang merupakan Ibu Kota dari Jawa Barat. kota Bandung merupakan kota yang memiliki keunggulan baik secara komparatif maupun kompetitif. Posisi kota yang strategis sebagai ibu kota Propinsi Jawa Barat, menjadikan kota Bandung sebagai pusat perekonomian. Tersedianya transportasi darat dan udara, memberikan kemudahan akses untuk berkunjung ke kota Bandung, baik secara domestik maupun internasional. Selain itu, kota Bandung sangat terkenal sebagai kota Pariwisata, dengan berbagai penawaran diberbagai bidang pariwisata wisata belanja, wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata *hobby* (minat atau kegemaran khusus). Wilayah bagian utara kabupaten Bandung, punya potensi budaya yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Bandung. Sejalan dengan perkembangan wilayah dan rencana tata ruang propinsi Jawa Barat periode 1980-1990, telah menjadi wilayah kota Bandung. Sejak itu, segala sesuatunya menjadi kewenangan pemerintah kota Bandung. Area ini sebelumnya berada di wilayah pemerintahan kabupaten Bandung, saat ini menjadi bagian dari kota Bandung. Dalam hal ini tidak menjadi sebuah beban bagi kota Bandung dan sebaliknya akan menjadi peluang untuk lebih mensejahterakan warganya termasuk mengembangkan potensi seni budayanya. Pariwisata adalah sektor penting dalam proses pembangunan. Tak semua kota maupun kabupaten memiliki potensi pariwisata di wilayahnya. Pemerintah pusat juga menempatkan sektor pariwisata sebagai urusan pilihan dalam nomenklatur (pembentukan) pembangunan. Sementara sektor budaya mempunyai posisi yang lebih strategis. Karenanya pemerintah pusat menempatkan sektor budaya sebagai urusan yang wajib dikelola oleh setiap pemerintahan di seluruh Indonesia. Sektor pembangunan mempunyai peran dan fungsi masing-masing bagi kepentingan masyarakat. Sektor pembangunan ini mempunyai fungsi selain sebagai sektor yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata di kota Bandung menjadi sebuah sektor andalan dalam meningkatkan PAD. Disatu sisi budaya merupakan bidang kajian yang *holistic* (secara menyeluruh), berpotensi dioptimalkan selain sebagai sumber PAD, juga sebagai sumber potensi ekonomi dan sosial.[[8]](#footnote-8)

Kehadiran Pemerintah Lokal (*Local Government)* di dalam arena internasional sebagai aktor baru saat ini ditandai dengan banyaknya perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan antar pemerintah-pemerintah lokal atau daerah diberbagai penjuru dunia. Berawal dari hal tersebut munculah jaringan-jaringan *Sister City* diberbagai penjuru dunia yang hingga saat ini semakin meningkat mulai dari kota-kota dan provinsi-provinsi dari negara-negara maju hingga negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Kerjasama *Sister City* juga sekaligus menunjukkan kenyataan bahwa pengaruh atau efek globalisasi telah melahirkan perkembangan pesat yang hampir terjadi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama dalam melahirkan beragam bentuk kerjasama di dunia. Hal ini khususnya dipengaruhi oleh kecendrungan kesadaran bahwa setiap Negara bangsa didunia tidak selamanya dapat mengandalkan potensi dalam negerinya untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dapat dipenuhi oleh negara lain melalui sebuah kerjasama. Seiring perkembangan kerjasama tersebut, lahir pula aktor-aktor baru seperti pemerintah daerah. Jika selama ini kerjasama awalnya hanya dilakukan antar pemerintah pusat sebuah negara, maka saat ini pemerintah daerah pun dapat secara aktif turut serta dalam kerjasama luar negeri, hal tersebutlah yang mendasari terbentuknya hubungan kemitraan antar kota (*Sister City*). Kerjasama *Sister City* merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik di mana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama daerah pantai atau daerah kepulauan[[9]](#footnote-9).

Di Indonesia sendiri *Sister City* lebih ditujukan untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi bidang-bidang seperti pendidikan dan budaya termasuk salah satu isu yang penting dalam skema *Sister City*. Istilah *Sister City* yang digunakan di kota Bandung juga didasarkan kepada PERMENDAGRI Nomor I tahun 1992, yang menyebutkan bahwa kerjasama *Sister City* adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Dalam pelaksanaannya, kerjasama *Sister City* harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri juga harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan SDM Aparatur (perangkat Pemerintah) serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing.[[10]](#footnote-10)

Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian kerjasama, menjadi bahan dan dasar bagi kedua pemerintah kota untuk membuat dan mengatur strategi kebijakan yang akan diterapkan masing-masing, khususnya pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut. Hubungan kerjasama yang terjalin antara kota Bandung dengan kota-kota tersebut tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan Sosial maupun di bidang Ekonomi. Hubungan kerjasama dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.[[11]](#footnote-11)

Pada perkembangannya kerjasama *Sister City* diharapkan dapat menjadi sebuah media yang menjembatani perbedaan kedua kota dan menciptakan kesempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan, mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta, mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak serta kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan.[[12]](#footnote-12)

Salah satu kerjasama *Sister City* Kota Bandung adalah menjalin hubungan *Sister City* dengan Kota Suwon, Republik Korea. Berawal dari inisiatif pertama Pemerintahan Kota Suwon yang berkeinginan mengadakan Mitra Kota dengan Kotamadya Bandung, yang disampaikan melalui Kedutaan Besar RI di Seoul dan Dirjen HELN (Hubungan Ekonomi dan Luar Negeri) Departemen Luar Negeri untuk disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI, kerjasama tersebut mencakup Bidang Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata, Investasi, Iptek, Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Pemuda dan Olah raga. Niatan baik yang berawal dari Pemerintah Kota Suwon yang berupa penawaran kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung, merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Suwon dalam mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung yang diharapkan tidak semata-mata hanya menjalin hubungan persahabatan yang saling pengertian diantara pemerintah kota tetapi juga sebagai upaya untuk menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai aspek. Beberapa aspek yang ditangani oleh masing-masing pemerintah kota mengalami kesamaan, dalam hal ini kesamaan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, Kota Bandung merupakan kota yang memiliki bermacam jenis kebudayaan dan merupakan sentral dari beberapa aspek seperti pendidikan dan industri di negaranya.[[13]](#footnote-13)

Munculnya peluang dan tantangan dengan melihat poin-poin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak didalam perjanjian kerjasama, menjadi bahan dan dasar bagi kedua pemerintah kota untuk membuat dan mengatur strategi kebijakan yang akan diterapkan masing-masing, khususnya pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan kerjasama *Sister City* tersebut. Disamping itu penulis mengaitkan *Multytrack Diplomacy* dalam frase kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon sebagai pokok analisi dalam penulisan skripsi ini. Atas alasan tersebut penulis mengangkat judul: **“Implementasi Kerjasama *Sister City*** Bandung**-**Suwon **Terhadap Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Kota** Bandung**”.**

# B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan penulis diatas, dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon ?
2. Bagaimana Pembangunan Sosial dan Ekonomi kota Bandung serta Hubungan dengan Program Pemerintah Kota ?
3. Bagaimana Program Kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon dalam Bidang Sosial dan Ekonomi ?

## Pembatasan Masalah

Mengingat bahwa luasnya ruang lingkup kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon dan demi memudah kan Penulis dalam penulisan Skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan yang akan di teliti dalam Skripsi ini di mana penulis fokus pada program kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam pembangunan sosial penulis fokus pada pendidikan dan budaya sedangkan pada pembangunan ekonomi penulis fokus pada pariwisata dan investasi di Kota Bandung.

## Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat sebuah rumusan masalah, yaitu**: “Bagaimana Implementasi kerjasama *Sister City*** Bandung**-**Suwon **dalam Pembangunan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata di Kota** Bandung**?”**

# E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kerjasama *Sister City* di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pembangunan sosial dan ekonomi di kota Bandung yang berhubungan denga program Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon dalam bidang Sosial dan Ekonomi.

## Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dan menambah kajian ilmu hubungan internasional khususnya untuk mengetahui Program Kerjasama *Siter City* di kota Bandung dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bandung agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melihat peluang dan tantangan yang ada di dalam Program Kerjasama *Siter City* di kota Bandung.

# F. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

## 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sumber landasan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran guna membantu dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang berlandaskan terori-teori hubungan internasional dari pakar yang kompeten yang tentunya sesuai dengan masalah yang diteliti, teori-teori yang penulis gunakan sebagai landasan untuk mengalalisis adalah sebagai berikut:

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang di rumuskan pasa bentuk perjanijan. Setiap perjanjian internasional yang di laksanakan akan mengikat suatu Negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian internasional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat di laksanakan dalam suatu Negara. Dengan kata lain perlu adanya pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan untuk menerapkan isi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia. Kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan yang ada di Negara berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang di miliki tidak sama. Hal ini menjadikan suatu Negara membutuhkan suatu kemampuan dan kebutuhannya yang ada di Negara lainnya. Kerjasama internasionalakan menjadi sangat penting sehingga patut di pelihara dan di adakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat di maksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar Negara satu dengan yang lainnya.[[14]](#footnote-14)

 Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:[[15]](#footnote-15)

**“Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus”.**

Konsep *Sister City* pertama kali digunakan di Benua Eropa, yaitu antara Kota Keighley, Yorkshire Barat, Inggris dengan Kota Poix Du Nord, Perancis pada tahun 1920. Pada perkembangannya, muncul pula istilah *Twin City* atau Kota Kembar. Istilah *Twin City* lebih sering digunakan di benua Eropa, sementara istilah *Sister City* lebih sering digunakan oleh Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, istilah *Sister City* juga digunakan di Indonesia. Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri. Di Indonesia sendiri konsep *Sister City* lebih ditujukan untuk pembangunan ekonomi, akan tetapi bidang - bidang seperti pendidikan dan budaya termasuk salah satu isu yang penting dalam skema *Sister City*. Istilah *Sister City* yang digunakan di Kota Bandung juga didasarkan kepada PERMENDAGRI Nomor I tahun 1992, yang menyebutkan bahwa kerjasama *Sister City* adalah hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Administratif dengan Pemerintah Kota setingkat di luar negeri. Dalam pelaksanaannya, kerjasama *Sister City* harus berpedoman pada peraturan dan tertib administrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri juga harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam hal keuangan, kelembagaan dan ketersediaan SDM aparatur serta sesuai dengan potensi dan kebijakan pihak mitra asing.[[16]](#footnote-16)

Pembangunan merupakan proses perubahan kearah lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Selain itu pembangunan merupakan suatu proses, ini dimaksudkan bahwa setiap usaha pembangunan pasti memerlukan kesinambungan pelaksanaan, dalam arti tanpa mengenal batas akhir meskipun dalam perencanaannya dapat diatur berdasarkan azas skala prioritas dan suatu tahapan tertentu. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara. Indonesia juga mengalami pergeseran paradigma pembangunan, baik dari strategi ekonomi, strategi *people centered*, hingga pada strategi pemberdayaan masyarakat yang dikatakan suatu alternatif dari model pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan terdapat dua jenis tipe pembangunan yaitu pembanguan fisik yang merupakan sarana dan prasarana, sedangkan pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik. Jangan sampai pembangunan bertumpu pada salah satu aspek saja, tetapi pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain. Menurut Bachtiar Effendi (2002:114): Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial.”[[17]](#footnote-17)

Pembangunan sosial muncul sebagai respon terhadap pembangunan yang terdistorsi sebagaimana realita yang mencuat di Indonesia di mana pembangunan ekonomi tidak sejalan dengan pembangunan sosial. Oleh sebab itu perlu mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan sosial dengan cara yang di desain untuk mengengkat pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial berupaya menawarkan perspektif makro tentang kesejahteraan sosial yang juga berhubungan dengan berbagai macam strategi yang berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan untuk semua penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut, di perlukan adanua kebijakan pembangunan sosial terkonsentrasi pada apa yang di implkasikan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pembangunan sosial memiliki preventif (pencegahan) kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (*developmental*). Kebijakan pembangunan sosial merupakan ketetapan yang di desain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi Preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi Kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban Negara dalam memenuhi hak-hak warganya.[[18]](#footnote-18) Pembangunan sosial Menurut Midgey (2005:37) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi bertujuan untuk mempercepat mobilitas sosial dan ekonomi suatu masyarakat dengan atribut yang dinilai secara ekonomis, sedangkan pembangunan sosial bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat di semua lembaga sosial proses pembangunan ekonomi.[[19]](#footnote-19)

Konsep pembangunan sosial di kota Bandung yang orientasinya pada masyarakat Bandung dalam bidang pendidikan dan budaya telah lama di implementasikan di kota Bandung. Pemkot Bandung sendiri telah menyiapkan konsep pendidikan berkarakter yang cocok bagi masyarakat kota Bandung. Konsep ini fokus pada pendidikan karakter/formal, budaya, dan lingkungan. Pendidikan karakter yang di mana konsep tersebut telah menjadi perhatian berbagai negara terutama kota Bandung dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai *the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development* (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Dalam hal ini pendidikan karakter terus di upayakan agar masyarakat kota Bandung memiliki tingkat pendidikan yang baik sehingga masyarakat yang di bangun dalam pendidikan berkarakter dan formal dapat bersaing ke taraf nasional dan internasional.[[20]](#footnote-20)

Kota Bandung menjadi salah satu model kota yang mengintegrasikan budaya lokal dalam pembangunan. Bandung dinilai sebagai salah satu kota kreatif di dunia yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Menerapkan konsep filosofi budaya sunda dengan mendekatkan masyarakat pada alam, sesama masyarakat, hingga tuhan. Konsep ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan sosial budaya di kota Bandung yang saat ini hanya bisa diselesaikan dengan kembali mengedepankan budaya sebagai solusi. Berbagai permasalahan pembangunan yang dimaksud sangat beragam seperti kerusakan lingkungan, kemacetan, bencana banjir, hingga dampak psikologis stress terhadap warga. Konsep ini juga bertujuan agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa merusak lingkungan hidup sehingga masyarakat kota Bandung dapat hidup lebih bahagia. [[21]](#footnote-21)

perekonomian dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pengembangan ekonomi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan perekonomian, hal tersebutlah yang kadang menjadi kendala dalam menciptakan perekonomian yang lebih bagus. Para ekonom dari semua negara, baik negara-negara berkembang maupun sedang berkembang, yang menganut sistem kapitalis, sosialis, maupun campuran, semua sangat mendambakan dan menomorsatukan pertumbuhan ekonomi *(economic growth).* Pembangunan ekonomi ini sendiri dimaksud untuk menuju sasaran ke arah yang lebih baik bagi kesejahteraan seluruh masyarakat, karena itu pembangunan ekonomi tidak cukup dengan hanya melihat pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi saja, sasaran pembangunan ekonomi meliputi banyak aspek, tidak hanya dari segi peningkatan pendapatan per kapita saja, namun juga meliputi aspek yang lainnya, seperti perubahan pola pikir, pengetahuan, teknologi, sosial, dan kelembagaan, pembangunan ekonomi juga dilakukan melalui perencanaan dan tahapan-tahapan yang matang dan terperinci, setiap tahapan akan menargetkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut.[[22]](#footnote-22)

Sedangkan pembangunan ekonomi menurut Adam Smith (1723-1790) :

**“pembangunan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar berjalan baik dan sempurna. Syarat yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan spesialisasi yang dikontrol melalui mekanisme pasar. Peranan pemerintah hanya mengupayakan agar mekanisme pasar dapat berjalan baik”.[[23]](#footnote-23)**

Kota Bandung memiliki peran penting dalam perekonomian Jawa Barat, laju pertumbuhan ekonomi kota Bandung tergolong tinggi di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, nasional, bahkan internasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi kota Bandung pada tiga tahun terakhir ini rata-rata sebesar 8,62%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8%. Ekonomi Kota Bandung yang memiliki konsep ekonomi kerakyatan, yang di mana ekonomi kerakyatan fokus pada pemanfaatan sistem padat karya. Konsep ekonomi kerakyatan ini dapat di artikan apabila ada proyek besar maka harus dapat menggandeng pelaku ekonomi kecil, konsep ekonomi kerakyatan berpeluang pada bidang pariwisata, yang di namakan *bed and breakfast* di mana warga dapat menyewa rumah atau kamarnya sebagai hotel. Pemerintah kota Bandung fokus pada pembangunan pariwisata di kota Bandung, hal ini di dasari bahwa budaya sunda memiliki potensi untuk berkembang sehinga pemerintah kota Bandung terus berupaya dalam pembangunan pariwisata dalam konteks kebudayaan dengan tujuan mengenalkan budaya ke tingkat internasional dan meningkatkan perekonomian kota Bandung itu sendiri.[[24]](#footnote-24)

Konsep pembangunan manusia (human development) telah mengalami pergeseran makna. Jika dua sampai dengan tiga dekade lalu, pembangunan manusia diukur semata-mata berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki individu sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan ekonomi, maka kini makna pembangunan manusia berkembang lebih jauh, termasuk aktifitas pekerjaan sukarela serta pekerjaan kreatif yang memperkaya kehidupan individu. *The United Nations Development Program* (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB ini telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. UNDP menyatakan bahwa dimensi pembangunan manusia terdiri dari dua aspek, pertama peningkatan kemampuan manusia yang terdiri dari peningkatan hidup yang lebih lama dan sehat, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan standar kehidupan yang layak. Sedangkan yang kedua adalah penciptaan kondisi yang memungkinkan terciptanya pembangunan manusia. Beberapa elemen yang terkait dengan hal tersebut adalah partisipasi dalam politik dan komunitas, kondisi lingkungan dalam jangka panjang, hak dan rasa aman bagi setiap individu, serta terciptanya kesetaraan dan keadilan sosial. Pembangunan manusia diawali dengan memberikan pemahaman tentang konsep pekerjaan. Pada dasarnya pekerjaan memberikan rasa aman secara ekonomi. Pekerjaan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta proses kesetaraan gender. Namun lebih dari itu, pekerjaan juga bisa termanifestasi sebagai aksi kepedulian terhadap sesama dengan membangun keterikatan diantara keluarga, komunitas, dan masyarakat.[[25]](#footnote-25)

## 2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Dengan di simpulkannya kerjasama *Sister City* Bandung-Suwon dalam bidang pendidikan, budaya, dan Pariwisata telah di implementasi di kota bandung dalam hal ini di tandai dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana, seperti dalam bidang pendidikan kegiatan pertukaran pelajar, bantuan berupa donasi dan alat tulis yang di lakukan oleh Universitas Kyonggi serta pembuatan kelas kora di Universitas Maranatha, dalam bisang budaya terlaksana lah program pertukaran budaya dan pengenalan budaya antar kota di Bandung dan serta dalam bidang pariwisata telah terlaksana pertukaran wisata kuliner antara Bandung dan Suwon”**

# G. Metode Penelitian

## Metode Penelitian yang digunakan

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, observasi serta wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan. Data yang dianalisis menggunakan teknik penelitian kualitatif. penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin oleh kedua belah pada dasarnya telah memberikan manfaat atau dampak yang memang dapat dicapai, meskipun dalam praktek pelaksanaanya sendiri masih banyak ditemukan hal-hal yang masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotessis, yaitu:

**Tabel 1.1**

 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel (Konsep Teoritik)  | Indikator (Empirik)  | Verifikasi (Analisis)  |
| Variabel bebas : Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam bidang sosial dan ekonomi.  | 1. Adanya persetujuan kerjasama (MoU) antara Kota Bandung dengan Kota Suwon. 2. Adanya regulasi terbaru pada kerjasama *Sister City* pada bidang sosial dan ekonomi. | 1. Ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon pada 25 Agustus 1997 dan didalamnya terdapat kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi.Sumber: <http://bdg.ksln.co.id/>2. Pemerintah kota Bandung memberikan regulasi terbaru pada bidang sosial yang di dalamnya berisi pendidikan dan budaya serta bidang ekonomi yang di dalamnya pariwisata.Sumber : Wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf Fungsional Umum Bag. Kerjasama Daerah |
| Variabel Terikat : Meningkatkan perkembangan pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bandung.  | 1. Adanya program kerjasama *Sister City* dalam bidang pendidikan dan kebudayaan antara Kota Bandung dengan Kota Suwon. 2. Kerjasama Universitas Kristen Maranatha dengan Universitas Hanshin, Suwon. 3. Diberikannya kesempatan bagi masing-masing kota untuk memperkenalkan kebudayaan masing-masing. 4.Adanya program pengenalan potensi pariwisawa di kota Bandung. | 1. Pertukaran Pemuda yang difasilitasi oleh Siwon Youth Foundation.Sumber : http://bdg.ksln.co.id/2. Bantuan dari Universitas Kyonggi dalam bidang pendidikan berupa alat tulis dan dana bantuan untuk fasilitas PAUD di Kelurahan Sukamulya. Sumber: Wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf Fungsional Umum Bag. Kerjasama Daerah Pemkot Bandung3. Dibukanya Kelas Bahasa Korea Di Universitas Maranatha sejak tahun 2011 hingga 2013. Sumber: http://bdg.ksln.co.id/4. Tampilnya delegasi kebudayaan Kota Bandung di Kota Suwon dalam acara Hwaseong Cultural Festival 2013 dan tampilnya Tim Kebudayaan dari Universitas Kyonggi di Kota Bandung dalam Dago Car Free Day , Sumber : Wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf Fungsional Umum Bag. Kerjasama Daerah Pemkot Bandung.5. Kunjungan Pemerintah kota Bandung dan mengirimkan Chef ke kota Suwon untuk mengenalkan kuliner dan pariwisata kota Bandung Sumber : Wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf Fungsional Umum Bag. Kerjasama Daerah Pemkot Bandung. |

## Skema Teoritis

**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Teori**

Korea Selatan

Indonesia

Kota Bandung

Kota Suwon

*Sister City*

Implementasi MoU *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon

# Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

## Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang relatif lengkap serta dapat dipercaya dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode *Library Research* atau Studi Kepustakaan, di mana teknik pengumpulan data dengan mengadakan suatu penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, makalah-makalah, surat kabar, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan.

## Teknik Analisis Data

Tingkat analisis merupakan suatu proses memilah dan memilih beberapa masalah sehingga pada akhirnya diketahui masalah mana yang harus di analisis. Tingkat analisa yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah tingkat analisa induksionis. Analisa ini adalah suatu tingkat analisa di mana unit analisanya (unit yang dianggap sebagai variabel dependen) pada tingkatan yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka penulis menempatkan Implementasi Kerjasama *Sister City* sebagai variabel bebas sekaligus sebagai unit analisa dan menempatkan Pembangunan Sosial dan Ekonomi sebagai variabel terikat sekaligus sebagai unit eksplanasi.

# Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

## Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan

Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.

1. Balai Kota Pemerintah Kota Bandung

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung

## Jadwal Kegiatan Penelitiaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai September 2016.

# Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Dalam bab 1 ini membahas tentang pendahuluan, berisikan sub-sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, lokasi dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada Bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan varaibel bebas,. Yaitu sejarah terjalinnya kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Suwon, sejarah Kota Bandung, Sejarah Kota Bandung, Sejarah *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Suwon.

**BAB III** Dalam Bab III ini berisi Uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variabel lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi varibel terikat adalah perkembangan pendidikan dan budaya di Kota Bandung dan Kota Suwon.

**BAB IV** Dalam Bab IV ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V** Dalam Bab V ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah dilakukan.

1. DR. Anak Agung Bayu Perwita dan DR. Yayan Mochamad Yani “ Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, Pt. Remaja Rosdakarya Bandung , 2005 hlm.135 [↑](#footnote-ref-1)
2. Neumann, Iver B. 2007. Globalization and Diplomacy. Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt. <https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/432284/WP_nr724_07_Neumann.pdf> di akses pada tanggal 13 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Landasan Kerjasama Internasional, Landasan Belajar, <https://belajar.kemdikbud.go.id/SumberBelajar/tampilajar.php?ver=12&idmateri=66&lvl1=4&lvl2=5&lvl3=0&kl=8> di akses pada tanggal 4 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. Buku Panduan Umum Tata Cara Hub dan Kerjasama Luar Neger oleh Pemerintah Daerah, <http://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Panduan%20Umum%20Tata%20Cara%20Hub%20dan%20Kerjasama%20Luar%20Neger%20oleh%20Pemerintah%20Daerah.pdf> di akses pada tanggal 30 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Diplomasi Karakteristik dan Diplomasi Tradisional <http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html> di akses pada tanggal 30 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Neves, Miguel Santos. 2010. Paradiplomacy, Knowledge Regions and the Consolidation of “Soft Power” Vol 1. Hal 19 [↑](#footnote-ref-6)
7. Reinhard, Karakteristik Diplomasi Tradisional dan modern, http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/artikel\_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html [↑](#footnote-ref-7)
8. Bonie Nugraha , Potensi Budaya & Pariwisata Kota Bandung (revitalisasi tradisi) ,[http://destinasianews.com/index.php/meeting-insentive-confrence-exhibition/insentive/710-potensi-budaya-pariwisata-kota-Bandung-2-revitalisasi-tradisi](http://destinasianews.com/index.php/meeting-insentive-confrence-exhibition/insentive/710-potensi-budaya-pariwisata-kota-bandung-2-revitalisasi-tradisi) di akses pada tanggal 13 April 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pelaksanaan Kerjasama Kota Kembar, http://eprints.undip.ac.id/19249/PELAKSANAAN KERJASAMA KOTA KEMBAR (*SISTER CITY* COOPERATION)/ di akses pada tanggal 30 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Buku panduan *Sister City* , Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung, hml. 10 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid.hlm.13 [↑](#footnote-ref-11)
12. Laporan Kunjungan Delegasi Kota Bandung ke Kota Suwon, Republik Koreapada tanggal 5-10 Oktober 2011 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Op. Cit. Buku Panduan Sister City Bandung*, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara berkembang, Jakarta, Yasif Watampone, 2010, hlm.87 [↑](#footnote-ref-14)
15. K.J Holsti, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analis, Jilid II, Terjemahan M. Tarir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hlm 652 [↑](#footnote-ref-15)
16. SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI, Sejarah dan dasar hukum *Sister City*, <http://bdg.ksln.co.id/sejarah.php> di akses pada tanggal 12 april 2017 [↑](#footnote-ref-16)
17. Effendi, Bachtiar, 2002, Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan. Yogyakarta: Uhaindo dan Offset. hlm 64. [↑](#footnote-ref-17)
18. Bambang Rusanto, 2008*: Metode Partisipatori Assement dan Rencana Tindak Bagi pekerja sosial* , Bandung : STKS [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. hlm.3 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kesejahteraan Sosial, [https://ppid.Bandung.go.id/2017/02/28/pusat-kesejahteraan-sosial-puskesos/](https://ppid.bandung.go.id/2017/02/28/pusat-kesejahteraan-sosial-puskesos/) di akses pada tanggal 13 April 2017 [↑](#footnote-ref-20)
21. *World Culture Forum* 2016, Bandung Dinilai Berhasil Integrasikan Budaya dan Pembangunan, [http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/10/11/world-culture-forum-2016-Bandung-dinilai-berhasil-integrasikan-budaya-dan](http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/10/11/world-culture-forum-2016-bandung-dinilai-berhasil-integrasikan-budaya-dan) di akses pada tanggal 13 April 2017 [↑](#footnote-ref-21)
22. Pembangunan Ekonomi dan Dampak Positif Negatif, <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pembangunan-ekonomi-dampak-positif-negatif.html> di akses ada 7 April 2017 [↑](#footnote-ref-22)
23. Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Jakarta: Salemba Empat hlm. 55 [↑](#footnote-ref-23)
24. PPID KOTA BANDUNG,Ekonomi, Kebudayaan, Potensi Daya Tarik Pariwisata Di Kota Bandung https://ppid.Bandung.go.id/2017/04/09/kebudayaan-potensi-daya-tarik-pariwisata-di-kota-Bandung/ di akses pada tanggal 13 April 2017 [↑](#footnote-ref-24)
25. Jurnal**,** Prof. Dr. Hj. Syamsiah Badruddin, M.Si**, Teori dan Indikator Pembangunan Manusia,** <https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> **di akses pada tanggal 13 April 2017** [↑](#footnote-ref-25)